

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO
TAHUN 2026**



**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2026 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan. Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima..

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu pada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, dan pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Dokumen pelaksanaan penilaian risiko merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan system pengendalian intern yang akan menjadi titik awal dalam pengembangan SPIP dalam suatu instansi pemerintah. Dengan adanya dokumen tersebut diharapkan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas.

Lamongan, Maret 2026


CAMAT MANTUP

ILYAS, S.Kep., Ns.
Penata Tk. I
NIP. 19720220 199403 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
I. PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum.....	5
C. Maksud Dan Tujuan.....	5
D. Ruang Lingkup.....	6
II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....	6
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	6
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	6
III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN.....	7
A. Penetapan Konteks/Tujuan.....	7
B. Hasil Identifikasi Risiko.....	7
C. Hasil Analisis Risiko.....	11
D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan.....	10
E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan.....	19
IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	22
V. RANCANGAN PEMANTAUAN.....	25
VI. PENUTUP.....	25

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu (1) Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif ; (2) Meningkatkan kemandirian desa. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah ; (2) Meningkatnya pemberdayaan desa.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagai salah satu unsur penunjang urusan pemerintah dibidang kewilayahan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien sebagai upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang mungkin dapat terjadi sesuai dengan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Kegiatan pengendalian dilakukukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif.

Untuk dapat melihat nilai efektifitas dari pengendalian resiko yang telah direncanakan, maka dilakukan penilaian survei persepsi kepada seluruh pegawai mulai dari staf hingga pejabat eselon mengenai hasil penilaian pengendalian resiko pada unit kerja urusan keuangan.

Hasil penilaian yang telah dilakukan yakni dalam penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait telah memiliki hasil penilaian yang baik dan memadai baik dari hasil review dokumen maupun hasil survei persepsi.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tiap tribulan. Pemantauan

pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Stretegi yang dilakukan guna meningkatkan nilai hasil survei persepsi terkait komitmen terhadap kompetensi yakni dengan peningkatan kompetensi pegawai baik terkait pengelolaan dasar keuangan maupun pengelolaan resiko secara terintegrasi dan berkala. Hal ini diharapkan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan resiko yang baik di unit kerja masing-masing pegawai.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Kecamatan Mantup telah memperhatikan dan mengacu pada RPJMD. Adapun sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Permerintah Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP. Sehingga diperoleh tujuan dari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran dari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang ditetapkan adalah 1). Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan 2). Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian resiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi resiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko organisasi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan proses identifikasi resiko, perlu memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa suatu resiko. Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah menyusun hasil identifikasi resiko baik resiko strategis maupun resiko operasional. uraian identifikasi resiko sebagai berikut:

Tabel III.1 Identifikasi Risiko Strategis OPD

No	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan kinerja tidak selaras	Perencanaan kinerja tidak selaras antara RPJMD, Renstra, dan Perjanjian Kinerja sehingga nilai SAKIP rendah	RSO.26.99.316.01	Camat	1. Indikator kinerja tidak terukur 2. Data kinerja tidak valid	Internal	C	Kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja, Rekomendasi evaluasi SAKIP berulang setiap tahun	Kecamatan, Pemda, APIP
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Pelaporan kinerja tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya	Manipulasi data capaian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan	RSO.26.99.316.02	Camat	LKJIP disusun tidak berbasis Data/bukti dukung	Internal	C	1. Akuntabilitas menurun 2. Nilai SAKIP turun/tidak mencapai target	Kecamatan, Pemda
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tidak ditindaklanjuti secara optimal	Rekomendasi evaluasi SAKIP hanya ditindaklanjuti secara administratif tanpa perbaikan substantif pada sistem kinerja	RSO.26.99.316.03	Camat	1. Tidak ada rencana aksi tindak lanjut rekomendasi SAKIP 2. Monitoring tindak lanjut tidak berjalan	Internal	C	1. Nilai SAKIP tidak meningkat 2. Permasalahan kinerja berulang	Kecamatan, Pemda
4	Nilai Manajemen Risiko	Penerapan Manajemen Risiko belum efektif dan terintegrasi	Manajemen risiko hanya dilakukan sebagai pemenuhan dokumen (compliance), tidak digunakan dalam pengambilan keputusan	RSO.26.99.316.04	Camat	1. Kebijakan MR belum diterapkan konsisten 2. MR belum menjadi dasar pengambilan keputusan	Internal	C	Keputusan strategis tidak mempertimbangkan risiko sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan reputasi	Kecamatan, Pemda
5	Nilai Manajemen Risiko	Dokumen Manajemen Risiko tidak lengkap dan tidak mutakhir	Dokumen manajemen risiko tidak mencakup seluruh proses bisnis dan unit kerja	RSO.26.99.316.05	Camat	1. Identifikasi risiko tidak rutin 2. Register risiko tidak diperbarui	Internal	C	Risiko utama tidak teridentifikasi dan tidak tertangani secara memadai, potensi terjadinya kesalahan, penyimpangan dan fraud meningkat	Kecamatan, Pemda
6	Nilai Manajemen Risiko	Kompetensi SDM dalam manajemen risiko rendah	Kurangnya pemahaman pegawai terhadap konsep dan manfaat manajemen risiko	RSO.26.99.316.06	Camat	1. Minim pelatihan MR 2. Budaya risiko belum terbentuk	Internal	C	Penerapan manajemen risiko tidak efektif di level operasional	Kecamatan, Pemda
7	IKM Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik rendah	Masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang diberikan Kecamatan	RSO.26.99.316.07	Camat	1. Standar pelayanan tidak konsisten 2. Waktu layanan lama 3. Sarana dan prasarana layanan tidak memadai	Internal	C	1. Meningkatnya pengaduan dan keluhan masyarakat 2. Tidak tercapainya target kinerja layanan publik	Masyarakat, Kecamatan, Pemda
8	IKM Kecamatan	Keterlambatan pelayanan	Penyelesaian pelayanan melebihi waktu yang ditentukan	RSO.26.99.316.08	Camat	1. Keterbatasan anggaran 2. Sarana dan prasarana layanan tidak memadai	Internal	C	Risiko konflik atau ketegangan antara petugas dan pengguna layanan	Masyarakat, Kecamatan, Pemda
9	IKM Kecamatan	Nilai IKM unit layanan tidak mencapai target organisasi.	Hasil Survey IKM menunjukkan hasil dibawah target yang ditentukan	RSO.26.99.316.09	Camat	Tingkat kepuasan masyarakat menurun	Internal	C	1. Nilai evaluasi kinerja instansi menurun 2. Terhambatnya pencapaian tujuan strategis organisasi	Kecamatan, Pemda

Tabel III.2 Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/ UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Perencanaan	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencana menyusun dokumen perencanaan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan	ROO.26.99.316.01	Sekretaris/ Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Deadline yang terlalu mendadak dan SDM perencana yang kurang memadai	Internal	C	Dokumen tidak selesai tepat waktu, mempengaruhi penetapan anggaran dan program	Kecamatan, Pemda
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Evaluasi/ Pelaporan	Manipulasi data capaian kinerja (risiko fraud)	Data capaian kinerja dimanipulasi agar terlihat sesuai target dengan menambah atau mengurangi angka capaian tanpa dasar yang jelas	ROO.26.99.316.02	Sekretaris/ Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	1. Tekanan untuk memenuhi target atau tidak ada pengawasan 2. Budaya formalitas dalam pelaporan dan evaluasi	Internal	C	Laporan menyesatkan, keputusan berbasis data salah	Kecamatan, Pemda
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Pelaporan	Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan Periodik	Laporan keuangan periodik terlambat dilaporkan atau tidak diselesaikan tepat waktu	ROO.26.99.316.03	Sekretaris/ Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	1. Keterlambatan data dari unit kerja 2. Koordinasi lemah 3. Beban kerja tinggi.	Internal	C	Laporan keuangan terlambat disampaikan, mengganggu konsolidasi pemda	Kecamatan, Pemda
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Pelaksanaan/ Penyusunan	Laporan keuangan tidak lengkap atau tidak akurat	Data keuangan yang disajikan tidak lengkap, tidak sesuai realisasi, atau terdapat kesalahan pencatatan.	ROO.26.99.316.04	Sekretaris/ Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Rekonsiliasi tidak optimal, kesalahan input, lemahnya pengawasan.	Internal	C	Revisi berulang, menurunkan kualitas laporan, dan berpotensi menimbulkan temuan audit.	Kecamatan, Pemda
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik	Pelaksanaan	Data kepegawaian perangkat daerah tidak akurat/tidak update	Pengelola administrasi kepegawaian tidak melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan sinkronisasi data kepegawaian secara berkala antara dokumen fisik dan sistem informasi kepegawaian	ROO.26.99.316.05	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kesalahan data kepegawaian dan keterlambatan proses administrasi	Internal	C	Data kepegawaian tidak akurat dan tidak mutakhir	ASN, Kecamatan dan Pemda
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik	Pelaksanaan	Administrasi kepegawaian tidak tertib dan tidak terdokumentasi dengan baik	Pengelola administrasi kepegawaian tidak menata, mengarsipkan, dan mendokumentasikan dokumen kepegawaian secara sistematis dan sesuai ketentuan, sehingga dokumen sulit ditelusuri dan tidak tersedia saat dibutuhkan	ROO.26.99.316.06	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pemahaman SOP belum merata dan pengawasan pelaksanaan belum optimal	Internal	C	Terhambatnya pelayanan dan menurunnya kualitas administrasi kepegawaian	ASN, Kecamatan dan Pemda
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	Pelaksanaan	Administrasi umum tidak tertib	PPTK tidak melakukan administrasi umum dengan tertib dan tepat waktu	ROO.26.99.316.07	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur rendah	Internal	C	Kegiatan operasional kecamatan tidak berjalan optimal	Kecamatan, Pemda
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	Pelaksanaan	Koordinasi antar unit kerja dan lintas sektor tidak optimal	Pelaksanaan koordinasi antar unit kerja dan atau lintas sektor kurang efektif atau tidak berjalan sesuai dengan yang ditetapkan	ROO.26.99.316.08	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinasi yang lemah, hasil rapat koordinasi tidak ditindak lanjuti	Internal/ Eksternal	C	1. Sinkronisasi program terganggu 2. Permasalahan tidak terselesaikan	Masyarakat, Kecamatan, Pemda
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	Pelaksanaan	Anggaran/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa di mark up (risiko fraud)	Anggaran PBJ dan atau HPS yang disusun tidak dilakukan secara keahlian dengan tidak melakukan survey harga pasar	ROO.26.99.316.09	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	lemahnya peran reviu berjenjang dalam penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan (fraud) penganggaran PBJ	Internal	C	Risiko Temuan audit, kerugian keuangan daerah	Kecamatan, PPK, Pejabat pengadaan Pemda, Masyarakat
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	Pelaksanaan	Spesifikasi barang tidak sesuai kontrak (risiko kemitraan)	Spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak/SPK	ROO.26.99.316.10	PPKom, PPTK	Tekanan waktu dan target serapan anggaran - pengawasan pelaksanaan kontrak tidak optimal - Dokumen pendukung teknis tidak diverifikasi	Internal/ Eksternal	C	Barang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, kerugian keuangan daerah, penurunan kualitas layanan publik	Pengguna Barang, PPTK dan PPK, Pemda, Masyarakat
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	Pelaksanaan	Keterlambatan pembayaran	Tagihan Listrik dan air dibayar tidak tepat pada waktunya	ROO.26.99.316.11	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dokumen pendukung terlambat	Internal	C	kegiatan operasional terganggu	Kecamatan, Pemda
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	Pelaksanaan	Keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan BMD peralatan dan mesin kantor	Peralatan yang dilaporkan rusak/dirawat tidak sesuai dengan ID aset yang ada	ROO.26.99.316.12	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Data kerusakan BMD peralatan dan mesin tidak diperbarui	Internal	C	Kerusakan BMD dan keterlambatan pemeliharaan (service)	Kecamatan, Pemda

13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Pelaksanaan	Kendaraan dinas tidak terpelihara dengan baik sehingga tidak layak jalan dan tidak siap operasional	Kendaraan dinas tidak terpelihara dengan baik dan pajak kendaraan terlambat dibayarkan sehingga kendaraan digunakan dalam kondisi tidak optimal	ROO.26.99.316.13	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak menyusun dan melaksanakan jadwal pemeliharaan rutin, tidak memantau kondisi kendaraan secara berkala, serta terlambat menindaklanjuti kebutuhan servis dan perbaikan	Internal	C	Kendaraan dinas tidak layak jalan dan pajak terlambat dibayarkan sehingga menghambat kelancaran tugas operasional perangkat daerah	Kecamatan, Pemda
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Pelaporan	Administrasi dan pelaporan pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak tertib dan tidak lengkap	Pengelola Barang Milik Daerah tidak mendokumentasikan, mengarsipkan, dan menyusun laporan pemeliharaan BMD secara lengkap dan tepat waktu, sehingga data pemeliharaan tidak akurat dan sulit ditelusuri	ROO.26.99.316.14	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Laporan pemeliharaan BMD tidak terdokumentasikan dan tersusun secara lengkap dan tepat waktu	Internal	C	Data dan laporan pemeliharaan tidak akurat sehingga menyulitkan pengawasan dan berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan	Kecamatan, Pemda
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi atau Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan pelayanan kepada masyarakat	Petugas kecamatan terlambat dalam memproses permohonan pelayanan masyarakat	ROO.26.99.316.15	Kasi Pelayanan Publik	Jumlah SDM yang terbatas, kendala jaringan dan aplikasi pelayanan	Internal/ Eksternal	C	Ketidpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur di kecamatan	Masyarakat, Kecamatan, Pemda
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi atau Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	Pelaksanaan	Pungutan Liar atau Gratifikasi (Fraud)	Petugas meminta imbalan diluar ketentuan dan diskriminasi pelayanan	ROO.26.99.316.16	Kasi Pelayanan Publik	Integritas rendah, Etika pelayanan rendah	Internal	C	Kerugian Masyarakat, Citra Buruk, Ketidakpercayaan Publik	Masyarakat, Kecamatan, Pemda
17	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	Perencanaan	Copy-paste usulan lama tanpa proses partisipatif nyata masyarakat	Pihak Desa Copy-paste usulan tahun lalu lama dari masyarakat tanpa proses partisipatif nyata atau peninjauan aspirasi secara langsung	ROO.26.99.316.17	Kasi PPM	1. Minimnya evaluasi usulan tahun sebelumnya, 2. Rendahnya partisipasi masyarakat 3. Budaya administratif (sekadar memenuhi kewajiban)	Internal/ Eksternal	UC	1. Usulan tidak sesuai kebutuhan terkini masyarakat 2. Menurunnya kualitas perencanaan pembangunan	Masyarakat, Desa, Kecamatan, Pemda
18	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi atau Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	Pelaksanaan	Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Kurang Optimal	Koordinasi antar pemangku kepentingan yang kurang optimal menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sinkron dan hasil program kurang maksimal.	ROO.26.99.316.18	Kasi PPM	1. Komunikasi antar pihak belum berjalan efektif 2. Kurangnya forum koordinasi yang rutin	Internal/ Eksternal	C	1. Kegiatan tidak efektif dan tidak tepat sasaran 2. Tujuan program sulit tercapai	Masyarakat, Desa, Kecamatan, Pemda
19	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK Tingkat Kecamatan yang Dilaksnakan	Pelaksanaan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan PKK	Pada saat kegiatan pemberdayaan PKK jumlah masyarakat yang hadir sangat sedikit dibandingkan jumlah undangan yang disebarkan	ROO.26.99.316.19	Kasi PPM	Kurangnya informasi dan pemahaman akan manfaat yang diperoleh, kesibukan bekerja	Eksternal	UC	Tujuan kegiatan pemberdayaan tidak tercapai maksimal	Kecamatan, Pemda
20	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK Tingkat Kecamatan yang Dilaksnakan	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.	Pelaksana kegiatan terlambat melaksanakan jadwal yang telah ditetapkan sehingga kegiatan mundur dari rencana dan target pelaksanaan tidak tercapai sesuai waktu yang ditentukan.	ROO.26.99.316.20	Kasi PPM	Perencanaan jadwal yang kurang realistis, koordinasi antar pelaksana yang lemah, dan keterbatasan sumber daya	Internal	C	Keterlambatan pencapaian target kegiatan, penurunan kualitas pelaksanaan, serta berkurangnya efektivitas dan manfaat program bagi masyarakat.	Masyarakat, Kecamatan, Pemda
21	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Dilakukan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan	Kegiatan koodinasi dengan lembaga/instansi terkait belum optimal	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tidak tertangani secara efektif akibat keterbatasan personel, koordinasi, dan sarana prasarana.	ROO.26.99.316.21	Kasi Trantibum	1. Jumlah dan kompetensi personel Trantibum terbatas 2. Koordinasi lintas instansi belum optimal	Internal/ Eksternal	C	Gangguan Trantibum tidak tertangani tepat waktu , menurunnya rasa aman masyarakat	Masyarakat, Kecamatan, Pemda

22	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Dilakukan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelaporan	Hasil kegiatan tidak terdokumentasi dan tidak ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	Hasil kegiatan tidak seluruhnya didokumentasikan secara tertulis dan sistematis. Notulen rapat, laporan kegiatan, serta dokumentasi pendukung tidak disusun secara lengkap atau hanya bersifat administratif dasar.	ROO.26.99.316.22	Kasi Trantibum	Dokumentasi dan administrasi kegiatan tidak disusun secara sistematis, Tidak adanya rencana tindak lanjut yang jelas serta kurangnya koordinasi pasca kegiatan	Internal	C	Kegiatan sinergitas bersifat seremonial dan tidak terjadi peningkatan nyata dalam penanganan Trantibum	Masyarakat, Kecamatan, Pemda
23	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan	Penugasan dari Kepala Daerah tidak tersampaikan dengan jelas atau berubah-ubah	Pelaksanaan urusan pemerintahan umum tidak berjalan optimal sesuai penugasan Kepala Daerah	ROO.26.99.316.23	Kasi Trantibum	Juklak/juknis belum lengkap, koordinasi lintas OPD lemah, keterbatasan SDM dan anggaran	Internal/ Eksternal	C	Target penugasan tidak tercapai, keterlambatan pelaksanaan	Masyarakat, Kecamatan, Pemda
24	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan secara optimal	Capaian, kendala, dan dampak pelaksanaan kegiatan tidak terukur dan tidak menjadi dasar perbaikan kebijakan berikutnya	ROO.26.99.316.24	Kasi Trantibum	Tidak adanya pedoman atau format baku evaluasi, Evaluasi dianggap sebagai kegiatan tambahan, Keterbatasan waktu dan SDM	Internal	C	Tingkat keberhasilan penugasan tidak dapat diukur, tidak ada rekomendasi perbaikan kegiatan	Masyarakat, Kecamatan, Pemda
25	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaporan	Dokumen administrasi desa tidak tertib dan lengkap	Perangkat Desa tidak melaksanakan peaporan/ administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan lengkap dan tepat waktu	ROO.26.99.316.25	Kasi Pemerintahan	Rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap tertib administrasi pemerintahan desa	Eksternal	UC	Administrasi yang tidak tertib, Ketidakefektifan dokumen yang dapat menghambat kelancaran pelayanan publik di tingkat desa.	Desa, Kecamatan, Pemda, Masyarakat
26	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan	Rendahnya kepatuhan pemerintah desa terhadap rekomendasi pembinaan	Rekomendasi hasil fasilitasi dan pengawasan tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah desa	ROO.26.99.316.26	Kasi Pemerintahan	Keterbatasan pemahaman, kapasitas SDM, kurangnya komitmen aparat desa	Internal/ Eksternal	UC	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti, perbaikan tata kelola desa tidak optimal	Masyarakat, Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis risiko dibutuhkan guna mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan. Serta menetapkan skala dan status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Pengukuran dimensi kemungkinan kejadian risiko dan konsekuensi atau dampak risiko menggunakan 5 (lima) tingkatan, sebagai berikut:

Tabel III.3 Kriteria Kemungkinan Risiko

Kriteria Risiko	
Kriteria Kemungkinan	
Nilai Kemungkinan	Keterangan
1	Sangat Jarang
2	Jarang
3	Kadang-kadang
4	Sering
5	Sangat Sering

Tabel III.4 Kriteria Konsekuensi / Dampak Risiko

Kriteria Risiko	
Kriteria Dampak Risiko	
Nilai Dampak	Keterangan
1	Tidak Signifikan
2	Kurang Signifikan
3	Sedang
4	Signifikan
5	Sangat Signifikan

Setelah mengetahui tingkatan skala atau level dari kemungkinan dan dampak resiko. Maka perlu juga mengetahui tingkatan resiko, tingkatan resiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Pengukuran tingkatan resiko diperlukan guna mengetahui dan menetapkan status resiko yang akan di uraikan. Perhitungan nilai tingkatan resiko sebagai berikut :

Tabel III.5 Tingkatan Risiko

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat jarang	1	2	3	4	5

Keterangan :

Nilai ≤ 4 = Hijau Nilai 9 – 14 = Oranye
 Nilai 5 – 8 = Kuning Nilai 15 – 25 = Merah

Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang referensi nilai kemungkinan dan referensi nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari resiko dengan tingkat terbesar sampai dengan tingkat terkecil. Peringkat status risiko ditentukan berdasarkan tingkat dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, uraian status risiko sebagai berikut:

Tabel III.6 Status Risiko

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat
2	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

Keterangan :

Hijau = Rendah Oranye = Tinggi
 Kuning = Sedang Merah = Sangat Tinggi

Dari tabel penilaian analisis tersebut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah menyusun analisis risiko berdasarkan penilaian hasil dari survei responden pada masing-masing pegawai, mulai dari staf – eselon sesuai urutan kategori baik analisis resiko strategis maupun resiko operasional, sebagai berikut :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
Risiko Strategis OPD					
1	Perencanaan kinerja tidak selaras	RSO.26.99.316.01	3	5	15
2	Pelaporan kinerja tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya	RSO.26.99.316.02	4	3	12
3	Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tidak ditindaklanjuti secara optimal	RSO.26.99.316.03	3	4	12
4	Penerapan Manajemen Risiko belum efektif dan terintegrasi	RSO.26.99.316.04	3	3	9
5	Dokumen Manajemen Risiko tidak lengkap dan tidak mutakhir	RSO.26.99.316.05	4	5	20
6	Kompetensi SDM dalam manajemen risiko rendah	RSO.26.99.316.06	3	3	9
7	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik rendah	RSO.26.99.316.07	2	3	6
8	Keterlambatan pelayanan	RSO.26.99.316.08	3	3	9
9	Nilai IKM unit layanan tidak mencapai target organisasi.	RSO.26.99.316.09	3	2	6

Gambar 1. Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Risiko Strategis SIMARIO

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
Risiko Operasional OPD					
1	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	ROO.26.99.316.01	3	4	12
2	Manipulasi data capaian kinerja (risiko fraud)	ROO.26.99.316.02	5	3	15
3	Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan Periodik	ROO.26.99.316.03	4	4	16
4	Laporan keuangan tidak lengkap atau tidak akurat	ROO.26.99.316.04	3	3	9
5	Data kepegawaian perangkat daerah tidak akurat/tidak update	ROO.26.99.316.05	4	3	12
6	Administrasi kepegawaian tidak tertib dan tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.26.99.316.06	4	3	12
7	Administrasi umum tidak tertib	ROO.26.99.316.07	3	3	9
8	Koordinasi antar unit kerja dan lintas sektor tidak optimal	ROO.26.99.316.08	4	4	16
9	Anggaran/Harga Perikaaan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa di mark up (risiko fraud)	ROO.26.99.316.09	2	4	8
10	Spesifikasi barang tidak sesuai kontrak (risiko kemitraan)	ROO.26.99.316.10	4	4	16
11	Keterlambatan pembayaran tagihan Listrik dan air	ROO.26.99.316.11	4	4	16
12	Keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan BMD peralatan dan mesin kantor	ROO.26.99.316.12	3	5	15
13	Kendaraan dinas tidak terpelihara dengan baik sehingga tidak layak jalan dan tidak siap operasional	ROO.26.99.316.13	4	4	16
14	Administrasi dan pelaporan pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak tertib dan tidak lengkap	ROO.26.99.316.14	4	5	20
15	Terjadinya keterlambatan pelayanan kepada masyarakat	ROO.26.99.316.15	3	4	12
16	Pungutan Liar atau Gratifikasi (Fraud)	ROO.26.99.316.16	4	4	16
17	Copy-paste usulan lama tanpa proses partisipatif nyata masyarakat	ROO.26.99.316.17	4	3	12
18	Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Kurang Optimal	ROO.26.99.316.18	3	4	12
19	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan PKK	ROO.26.99.316.19	4	2	8
20	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.	ROO.26.99.316.20	4	3	12
21	Kegiatan koodinasi dengan lembaga/instansi terkait belum optimal	ROO.26.99.316.21	4	5	20
22	Hasil kegiatan tidak terdokumentasi dan tidak ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	ROO.26.99.316.22	2	3	6
23	Penugasan dari Kepala Daerah tidak tersampaikan dengan jelas atau berubah-ubah	ROO.26.99.316.23	3	4	12
24	Evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan secara optimal	ROO.26.99.316.24	4	3	12
25	Dokumen administrasi desa tidak tertib dan lengkap	ROO.26.99.316.25	3	4	12
26	Rendahnya kepatuhan pemerintah desa terhadap rekomendasi pembinaan	ROO.26.99.316.26	3	3	9

Gambar 2. Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Risiko Operasional SIMARIO

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan yang sudah dilakukan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk mengatasi resiko strategis sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja tidak selaras dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Pedoman SAKIP, reuiu dokumen perencanaan oleh Bappeda.
2. Pelaporan kinerja tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penyusunan LKJIP tahunan
3. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tidak ditindaklanjuti secara optimal dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penyampaian LHE SAKIP kepada unit kerja, Rapat evaluasi kinerja tahunan
4. Penerapan Manajemen Risiko belum efektif dan terintegrasi dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Kebijakan MR, Pembentukan Tim MR".
5. Dokumen Manajemen Risiko tidak lengkap dan tidak mutakhir dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penyusunan Register risiko tahunan
6. Kompetensi SDM dalam manajemen risiko rendah dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Sosialisasi MR/Bimtek Terbatas oleh Inspektorat
7. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik rendah dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni SOP Pelayanan, Monitoring dan evaluasi secara berkala
8. Keterlambatan pelayanan dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni SOP Pelayanan, Monitoring dan evaluasi secara berkala
9. Nilai IKM unit layanan tidak mencapai target organisasi dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni SOP Pelayanan, Monitoring dan evaluasi secara berkala

Selain itu kegiatan yang sudah dilakukan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk mengatasi resiko operasional adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Jadwal penyusunan dokumen sudah ditetapkan.
2. Manipulasi data capaian kinerja (risiko fraud) dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Review laporan oleh pimpinan unit.
3. Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan Periodik dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni jadwal pelaporan, Penugasan staf keuangan.
4. Laporan keuangan tidak lengkap atau tidak akurat dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Aplikasi keuangan dan supervisi atasan, Rekonsiliasi internal.
5. Data kepegawaian perangkat daerah tidak akurat/tidak update dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Verifikasi berjenjang dan penggunaan aplikasi sistem kepegawaian.
6. Administrasi kepegawaian tidak tertib dan tidak terdokumentasi dengan baik dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penerapan SOP administrasi kepegawaian
7. Administrasi umum tidak tertib dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penerapan dan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur administrasi
8. Koordinasi antar unit kerja dan lintas sektor tidak optimal dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penguatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja
9. Anggaran/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa di mark up (risiko fraud) dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Spesifikasi barang tidak sesuai kontrak (risiko kemitraan) dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni BAST, Pemeriksaan administrasi dan fisik barang
11. Keterlambatan pembayaran tagihan Listrik dan air dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni penyampain informasi jumlah tagihan listrik dan air secara rutin.

12. Keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan BMD peralatan dan mesin kantor dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Penguatan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan BMD
13. Kendaraan dinas tidak terpelihara dengan baik sehingga tidak layak jalan dan tidak siap operasional dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Pendataan kendaraan dinas dan pemantauan masa berlaku pajak kendaraan
14. Administrasi dan pelaporan pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak tertib dan tidak lengkap dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Penyusunan laporan dan penyimpanan dokumen kegiatan secara periodic
15. Terjadinya keterlambatan pelayanan kepada masyarakat dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Maklumat Pelayanan, SOP Pelayanan, Kanal Pengaduan
16. Pungutan Liar atau Gratifikasi (Fraud) dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Maklumat Pelayanan , SOP Pelayanan, Kanal Pengaduan
17. Copy–paste usulan lama tanpa proses partisipatif nyata masyarakat dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Tersedia arsip hasil Musrenbang tahun sebelumnya, jadwal Musrenbang telah ditetapkan, Tersedia format baku usulan kegiatan, Input usulan melalui SIPD/e-Planning
18. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Kurang Optimal dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Rapat koordinasi rutin., Pembagian tugas jelas, Monitoring dan evaluasi bersama.
19. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan PKK dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Sosialisasi kegiatan PKK Desa dan penyampaian informasi kegiatan melalui pengumuman.
20. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Penyusunan jadwal dan rencana kerja kegiatan, pembagian tugas pelaksana, koordinasi melalui rapat, serta monitoring pelaksanaan secara berkala.
21. Kegiatan koodinasi dengan lembaga/instansi terkait belum optimal dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Penugasan personel Trantibum kecamatan, Koordinasi insidental dengan Satpol PP, Polsek, dan Koramil, Patroli rutin terbatas, Tersedia SOP penanganan Trantibum - Pelaporan kejadian kepada pimpinan
22. Hasil kegiatan tidak terdokumentasi dan tidak ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni

Penyampaian laporan situasi wilayah dengan cara komunikasi cepat melalui media informal.

23. Penugasan dari Kepala Daerah tidak tersampaikan dengan jelas atau berubah-ubah dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Surat penugasan, koordinasi internal, pelaporan kepada pimpinan
24. Evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan secara optimal dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Monitoring oleh atasan langsung
25. Dokumen administrasi desa tidak tertib dan lengkap dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Konferensi Perangkat Desa, Penugasan Perangkat Desa
26. Rendahnya kepatuhan pemerintah desa terhadap rekomendasi pembinaan dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Pendampingan oleh kecamatan dan pendamping desa

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu tindakan preventif dan mitigasi. Pengendalian yang bersifat preventif merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigasi merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Dalam setiap tindakan pengendalian yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja akan masih ada celah pengendalian yang dapat memberikan dampak buruk bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Sehingga perlu dibangun tindakan pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko baik risiko strategis maupun operasional sebagai berikut :

Tabel III.7 Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Kecamatan Mantup:							
1	Perencanaan kinerja tidak selaras	RSO.26.99.316.01	Pedoman SAKIP, revidi dokumen perencanaan oleh Bappeda	Revidi belum fokus pada keterkaitan outcome dan indikator	Monitoring dan evaluasi berkala atas keselarasan perencanaan dan realisasi kinerja	Camat	Januari-Desember 2026
2	Pelaporan kinerja tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya	RSO.26.99.316.02	Penyusunan LKJIP tahunan	Belum ada mekanisme uji kualitas data secara sistematis	Review LKJIP oleh APIP	Camat	Januari-Desember 2026
3	Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tidak ditindaklanjuti secara optimal	RSO.26.99.316.03	- Penyampaian LHE SAKIP kepada unit kerja - Rapat evaluasi kinerja tahunan	Tidak adanya monitoring dan pelaporan berkala atas progres tindak lanjut rekomendasi, Belum diterapkannya reward and punishment atas kepatuhan tindak lanjut rekomendasi SAKIP.	Monitoring dan pelaporan tindak lanjut secara berkala	Camat	Januari-Desember 2026
4	Penerapan Manajemen Risiko belum efektif dan terintegrasi	RSO.26.99.316.04	- Kebijakan MR - Pembentukan Tim MR"	Peran dan tanggung jawab pemilik risiko (risk owner) belum ditetapkan secara jelas	Integrasi MR dalam perencanaan & penganggaran, Penguatan peran pimpinan	Camat	Januari-Desember 2026
5	Dokumen Manajemen Risiko tidak lengkap dan tidak mutakhir	RSO.26.99.316.05	Penyusunan Register risiko tahunan	Belum ada kewajiban pelibatan seluruh unit kerja, register risiko hanya dilakukan oleh unit tertentu	Revidi dan update risiko berkala	Camat	Januari-Desember 2026
6	Kompetensi SDM dalam manajemen risiko rendah	RSO.26.99.316.06	Sosialisasi MR/Bimtek Terbatas oleh Inspektorat	Pelatihan tidak berkelanjutan dan tidak menjangkau seluruh pegawai	Penugasan PIC MR di unit kerja, Pelaporan risiko berkala	Camat	Januari-Desember 2026
7	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik rendah	RSO.26.99.316.07	- SOP Pelayanan - Monitoring dan evaluasi secara berkala	- jaringan internet yang sering trobel - ketersediaan blanko - sarpras penunjang kurang memadai karena keterbatasan anaggaran untuk pengadaan	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, pengadaan sarpras penunjang	Camat	Januari-Desember 2026
8	Keterlambatan pelayanan	RSO.26.99.316.08	- SOP Pelayanan - Monitoring dan evaluasi secara berkala	- jaringan internet yang sering trobel - ketersediaan blanko - sarpras penunjang kurang memadai karena keterbatasan anaggaran untuk pengadaan	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, penganggaran sarpras	Camat	Januari-Desember 2026
9	Nilai IKM unit layanan tidak mencapai target organisasi.	RSO.26.99.316.09	- SOP Pelayanan - Monitoring dan evaluasi secara berkala	- jaringan internet yang sering trobel - ketersediaan blanko - sarpras penunjang kurang memadai karena keterbatasan anaggaran untuk pengadaan	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, pengadaan sarpras penunjang	Camat	Januari-Desember 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Operasional OPD Kecamatan Mantup:							
1	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	ROO.26.99.316.01	Jadwal penyusunan dokumen sudah ditetapkan	Jadwal belum realistis, koordinasi lintas unit lemah	Menyusun timeline realistis, melakukan koordinasi rutin dengan OPD terkait	Kasubag perencanaan, evaluasi dan keuangan	Januari-Desember 2026
2	Manipulasi data capaian kinerja (risiko fraud)	ROO.26.99.316.02	Review laporan oleh pimpinan unit	Review internal terbatas, tidak semua data diverifikasi	Pengecekan lintas unit dan penggunaan data sumber primer	Kasubag perencanaan, evaluasi dan keuangan	Januari-Desember 2026
3	Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan Periodik	ROO.26.99.316.03	jadwal pelaporan, Penugasan staf keuangan	Kepatuhan terhadap tenggat masih rendah, Pembagian tugas belum optimal	Menetapkan batas waktu tegas, reminder resmi, Membentuk tim penyusun laporan periodik dan pembagian tugas yang jelas	Kasubag perencanaan, evaluasi dan keuangan	Januari-Desember 2026
4	Laporan keuangan tidak lengkap atau tidak akurat	ROO.26.99.316.04	Aplikasi keuangan dan supervisi atasan, Rekonsiliasi internal	Human error masih terjadi, Rekonsiliasi belum rutin	Checklist dokumen laporan, Menetapkan rekonsiliasi berkala	Kasubag perencanaan, evaluasi dan keuangan	Januari-Desember 2026
5	Data kepegawaian perangkat daerah tidak akurat/tidak update	ROO.26.99.316.05	Verifikasi berjenjang dan penggunaan aplikasi sistem kepegawaian	Belum ada jadwal pemutakhiran data yang baku dan terdokumentasi	Penyusunan jadwal rutin pemutakhiran data kepegawaian dan monitoring berkala	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026
6	Administrasi kepegawaian tidak tertib dan tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.26.99.316.06	Penerapan SOP administrasi kepegawaian	Pemahaman SOP belum merata	Sosialisasi dan penguatan penerapan SOP	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026
7	Administrasi umum tidak tertib	ROO.26.99.316.07	Penerapan dan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur administrasi	Pengawasan kepatuhan terhadap prosedur administrasi belum berjalan optimal	Melaksanakan pengawasan secara rutin dan berjenjang	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026
8	Koordinasi antar unit kerja dan lintas sektor tidak optimal	ROO.26.99.316.08	Penguatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Evaluasi efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja belum dilakukan secara berkala	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026
9	Anggaran/Harga Perikaaan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa di mark up (risiko fraud)	ROO.26.99.316.09	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	Data harga tidak mutakhir, reviu HPS belum independen	Pemanfaatan e-catalog/price database resmi secara optima	Camat	Januari-Desember 2026
10	Spesifikasi barang tidak sesuai kontrak (risiko kemitraan)	ROO.26.99.316.10	- BAST - Pemeriksaan administrasi dan fisik barang	Pemeriksaan barang bersifat administratif, kolusi dengan penyedia	Pemeriksaan teknis sesuai kontrak, pengawasan melekat oleh PA	Camat	Januari-Desember 2026
11	Keterlambatan pembayaran tagihan Listrik dan air	ROO.26.99.316.11	penyampain informasi jumlah tagihan listrik dan air secara rutin.	keterbatasan waktu dan kelalaian	Pembayaran lebih awal sebelum jatuh tempo dan konfirmasi pembayaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026
12	Keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan BMD peralatan dan mesin kantor	ROO.26.99.316.12	Penguatan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan BMD	Pencatatan BMD belum dilakukan secara tertib dan akurat	Menertibkan pencatatan BMD sesuai ketentuan perundang-undangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026
13	Kendaraan dinas tidak terpelihara dengan baik sehingga tidak layak jalan dan tidak siap operasional	ROO.26.99.316.13	Pendataan kendaraan dinas dan pemantauan masa berlaku pajak kendaraan	Belum adanya pengingat (reminder) pembayaran pajak dan jadwal pemeliharaan	Menyusun jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026
14	Administrasi dan pelaporan pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak tertib dan tidak lengkap	ROO.26.99.316.14	Penyusunan laporan dan penyimpanan dokumen kegiatan secara periodik	Dokumentasi belum terdigitalisasi dan belum tersusun sistematis	Menata dan mengarsipkan dokumen pemeliharaan/ rehabilitasi gedung secara tertib dan terstruktur	Pengelola Sarana Prasarana/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari-Desember 2026
15	Terjadinya keterlambatan pelayanan kepada masyarakat	ROO.26.99.316.15	- Maklumat Pelayanan - SOP Pelayanan - Kanal Pengaduan	kendala jaringan dan keterbatasan jumlah opertor	Penerapan SOP Pelayanan dan koordinasi dengan dinas terkait	Kasi Pelayanan	Januari-Desember 2026
16	Pungutan Liar atau Gratifikasi (Fraud)	ROO.26.99.316.16	- Maklumat Pelayanan - SOP Pelayanan - Kanal Pengaduan	Kurangnya partisipasi dalam pelayanan dan laporan pengaduan belum sesuai	Penerapan SOP Pelayanan dan Pengawasan oleh pimpinan	Kasi Pelayanan	Januari-Desember 2026

17	Copy-paste usulan lama tanpa proses partisipatif nyata masyarakat	ROO.26.99.316.17	- Tersedia arsip hasil Musrenbang tahun sebelumnya - Jadwal Musrenbang telah ditetapkan - Tersedia format baku usulan kegiatan - Input usulan melalui SIPD/e-Planning	- Evaluasi capaian usulan tahun lalu tidak terdokumentasi - Notulen tidak mencatat usulan baru vs lama - SIPD tidak membedakan usulan hasil copy-paste	Dokumentasi proses partisipatif, Review dan verifikasi berlapis oleh kecamatan dan OPD teknis	Camat, Kasi PPM	Januari-Desember 2026
18	Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Kurang Optimal	ROO.26.99.316.18	-Rapat koordinasi rutin. -Pembagian tugas jelas. -Monitoring dan evaluasi bersama.	"-Koordinasi belum mencakup semua lembaga terkait. - Pembagian tugas kadang tidak diikuti secara konsisten. -Monitoring dan evaluasi belum rutin dan menyeluruh."	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin dan terdokumentasi.	Camat, Kasi PPM	Januari-Desember 2026
19	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan PKK	ROO.26.99.316.19	Sosialisasi kegiatan PKK Desa dan penyampaian informasi kegiatan melalui pengumuman	belum menjangkau kegiatan masyarakat jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat	Sosialisasi melalui berbagai media penyesuaian waktu kegiatan	Camat, Kasi PPM, Kader PKK	Januari-Desember 2026
20	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.	ROO.26.99.316.20	Penyusunan jadwal dan rencana kerja kegiatan, pembagian tugas pelaksana, koordinasi melalui rapat, serta monitoring pelaksanaan secara berkala.	Jadwal yang kurang realistis, pembagian tugas yang belum jelas, koordinasi yang belum optimal, serta monitoring pelaksanaan yang belum konsisten.	Perbaikan dan penyesuaian jadwal kegiatan, monitoring agar kegiatan berjalan tepat waktu.	Camat, Kasi PPM	Januari-Desember 2026
21	Kegiatan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait belum optimal	ROO.26.99.316.21	- Penugasan personel Trantibum kecamatan - Koordinasi insidental dengan Satpol PP, Polsek, dan Koramil - Patroli rutin terbatas - Tersedia SOP penanganan Trantibum - Pelaporan kejadian kepada pimpinan	- Belum tersedia peta kerawanan Trantibum • SOP belum disosialisasikan dan disimulasikan • Koordinasi belum bersifat rutin dan terdokumentasi • Sarpras belum mencukupi kebutuhan lapangan • Evaluasi penanganan kejadian belum sistematis	Penguatan koordinasi melalui rapat rutin lintas instansi	Kasi Trantibum	Januari-Desember 2026
22	Hasil kegiatan tidak terdokumentasi dan tidak ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	ROO.26.99.316.22	Penyampaian laporan situasi wilayah dengan cara komunikasi cepat melalui media informal.	Rencana tindak lanjut belum terdokumentasi secara sistematis.	Menyusun rencana tindak lanjut setiap hasil koordinasi.	Kasi Trantibum	Januari-Desember 2026
23	Penugasan dari Kepala Daerah tidak tersampaikan dengan jelas atau berubah-ubah	ROO.26.99.316.23	Surat penugasan, koordinasi internal, pelaporan kepada pimpinan	Monitoring belum berbasis indikator, koordinasi lintas sektor belum terstruktur	Penguatan koordinasi lintas OPD/ Forkopimcam, monitoring dan evaluasi berkala	Kasi Trantibum	Januari-Desember 2026
24	Evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan secara optimal	ROO.26.99.316.24	Monitoring oleh atasan langsung	tidak ada tindak lanjut hasil evaluasi	Menyusun laporan evaluasi kegiatan	Kasi Trantibum	Januari-Desember 2026
25	Dokumen administrasi desa tidak tertib dan lengkap	ROO.26.99.316.25	Konferensi Perangkat Desa, Penugasan Perangkat Desa	Tidak adanya SOP administrasi yang baku, Pemisahan tugas dan kewenangan belum jelas, Kurangnya mekanisme verifikasi dan pengesahan dokumen	Penyusunan dan penerapan SOP Administrasi Desa, verifikasi dan pengesahan berjenjang	Kasi Pemerintahan	Januari-Desember 2026
26	Rendahnya kepatuhan pemerintah desa terhadap rekomendasi pembinaan	ROO.26.99.316.26	Pendampingan oleh kecamatan dan pendamping desa	Dokumentasi hasil tindak lanjut belum tertib	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pembinaan desa	Camat, Kasi Pemerintahan, Kasi PPM	Januari-Desember 2026

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Guna mendukung berjalanya lingkungan pengendalian yang dibangun, maka diperlukan media untuk menyampaikan masing-masing unsur lingkungan pengendalian. Media penyampaian informasi yang dilakukan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Informasi dan Komunikasi Pengendalian

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Mantup:					
1	Monitoring dan evaluasi berkala atas keselarasan perencanaan dan realisasi kinerja	Rapat evaluasi berkala	Camat/ Sekcam	Kasubah Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan
2	Review LKJIP oleh APIP	Monitoring berkala	Camat/ Sekcam	Kasubah Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Tribulan I
3	Monitoring dan pelaporan tindak lanjut secara berkala	Monitoring dan evaluasi	Camat/ Sekcam	Kasubah Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan
4	Integrasi MR dalam perencanaan & penganggaran, Penguatan peran pimpinan	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat/ Sekcam	Kasubah Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan
5	Reviu dan update risiko berkala	Monitoring dan evaluasi	Camat/ Sekcam	Kasubah Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan
6	Penugasan PIC MR di unit kerja, Pelaporan risiko berkala	SK Penunjukan PIC dan Laporan	Camat/ Sekcam	Kasubah Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan
7	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, pengadaan sarpras penunjang	Rapat Koordinasi	Camat/ Sekcam	Kasi Pelayanan Publik	Setiap tribulan
8	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, penganggaran sarpras	Rapat Koordinasi	Camat/ Sekcam	Kasi Pelayanan Publik	Setiap tribulan
9	koordinasi dengan dinas terkait, inovasi pelayanan, pengadaan sarpras penunjang	Rapat Koordinasi	Camat/ Sekcam	Kasi Pelayanan Publik	Setiap tribulan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Mantup:					
1	Menyusun timeline realistis, melakukan koordinasi rutin dengan OPD terkait	Rapat Koordinasi	Camat/ Sekcam	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Setiap tribulan
2	Pengecekan lintas unit dan penggunaan data sumber primer	Pemeriksaan/Evaluasi	Camat/ Sekcam	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Setiap tribulan
3	Menetapkan batas waktu tegas, reminder resmi, Membentuk tim penyusun laporan periodik dan pembagian tugas yang jelas	Jadwal Kegiatan, Rapat koordinasi berkala	Camat/ Sekcam	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Setiap tribulan
4	Checklist dokumen laporan, Menetapkan rekonsiliasi berkala	Evaluasi berkala	Camat/ Sekcam	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Setiap tribulan
5	Penyusunan jadwal rutin pemutakhiran data kepegawaian dan monitoring berkala	Jadwal kegiatan, monitoring berkala	Camat/ Sekcam	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
6	Sosialisasi dan penguatan penerapan SOP	Sosialisasi SOP	Camat/ Sekcam	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
7	Melaksanakan pengawasan secara rutin dan berjenjang	Pengawasan Berjenjang	Camat/ Sekcam	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
8	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Rapat koordinasi dan evaluasi	Camat/ Sekcam	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
9	Pemanfaatan e-catalog/price database resmi secara optima	Pelaksanaan kegiatan	Camat/ Sekcam	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
10	Pemeriksaan teknis sesuai kontrak, pengawasan melekat oleh PA	Pemeriksaan dan Pengawasan	Camat/ Sekcam	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
11	Pembayaran lebih awal sebelum jatuh tempo dan konfirmasi pembayaran	Pelaksanaan kegiatan	Camat/ Sekcam	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
12	Menertibkan pencatatan BMD sesuai ketentuan perundang-undangan	Penyusunan Laporan	Camat/ Sekcam	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
13	Menyusun jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas	Jadwal Pemeliharaan	Camat/ Sekcam	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
14	Menata dan mengarsipkan dokumen pemeliharaan/rehabilitasi gedung secara tertib dan terstruktur	Pengarsipan Dokumen	Camat/ Sekcam	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
15	Penerapan SOP Pelayanan dan koordinasi dengan dinas terkait	Jadwal Kegiatan	Camat/ Sekcam	Kasi PPM	Setiap tribulan
16	Penerapan SOP Pelayanan dan Pengawasan oleh pimpinan	Menyusun SOP	Camat/ Sekcam	Kasi PPM	Setiap tribulan
17	Dokumentasi proses partisipatif, Review dan verifikasi berlapis oleh kecamatan dan OPD teknis	Pendokumentasian Kegiatan	Camat/ Sekcam	Kasi PPM	Tribulan II
18	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin dan terdokumentasi.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Camat/ Sekcam	Kasi PPM	Setiap tribulan
19	Sosialisasi melalui berbagai media penyesuaian waktu kegiatan	Sosialisasi kegiatan	Camat/ Sekcam	Kasi PPM	Tribulan III
20	Perbaiki dan penyesuaian jadwal kegiatan, monitoring agar kegiatan berjalan tepat waktu.	Koordinasi dan monitoring kegiatan	Camat/ Sekcam	Kasi PPM	Tribulan III
21	Penguatan koordinasi melalui rapat rutin lintas instansi	Jadwal Kegiatan, rapat koordinasi	Camat/ Sekcam	Kasi Trantibum	Setiap tribulan
22	Menyusun rencana tindak lanjut setiap hasil koordinasi.	Laporan Tindak Lanjut	Camat/ Sekcam	Kasi Trantibum	Setiap tribulan
23	Penguatan koordinasi lintas OPD/ Forkopimcam, monitoring dan evaluasi berkala	Rapat Koordinasi	Camat/ Sekcam	Kasi Trantibum	Setiap tribulan
24	Menyusun laporan evaluasi kegiatan	Menyusun SOP	Camat/ Sekcam	Kasi Trantibum	Setiap tribulan
25	Penyusunan dan penerapan SOP Administrasi Desa, verifikasi dan pengesahan berjenjang	Menyusun SOP	Camat/ Sekcam	Kasi Pemerintahan	Tribulan II
26	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pembinaan desa	Monitoring dan Evaluasi	Camat/ Sekcam	Kasi Pemerintahan	Tribulan II

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang diterapkan, telah berjalan secara efektif mengatasi resiko dan apakah langkah-langkah perbaikan telah dilaksanakan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi pemantuan pelaksanaan kegiatan Pelayanan PATEN dan kegiatan Pemberdayaan Desa serta pelaksanaan RTP.

Bentuk atau metode pemantauan yang dilakukan oleh Kecamatan Mantup Kab. Lamongan adalah dengan senantiasa menerapkan SOP dalam setiap kegiatan Pelayanan Kecamatan serta melakukan pendampingan secara langsung kepada masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Mantup. Serta melakukan monitoring secara berkala melalui kegiatan rapat evaluasi, rapat koordinasi, monev, dan konferensi yang terjadwal.

VI. PENUTUP

Pelaporan manajemen risiko ini dilakukan sebagai wujud proses atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Dokumen ini menjadi instrument untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap unit kerja dan seluruh pegawai serta ditunjang dengan penerapan Standar Operasional Prosedur dalam setiap kegiatan pelayanan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian sehingga dapat menekan risiko yang mungkin terjadi secara bertahap dan berkelanjutan.

Kami akan melakukan analisis ulang apakah tindakan pengendalian yang sudah direncanakan dan dilaksanakan perlu dilakukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya.

Lamongan, Maret 2026


CAMAT MANTUP
[Handwritten Signature]
ILYAS, S.Kep., Ns.
Penata Tk. I

NIP. 19720220 199403 1 006